

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Biofarmaka

Indonesia memiliki sekitar 30.000 jenis tanaman obat, yang mencakup 90% dari tanaman obat yang ditemukan di wilayah Asia. Sekitar 25% atau sekitar 7.500 jenis dari total jumlah tersebut telah diketahui memiliki khasiat herbal atau tanaman obat. Namun, hanya sekitar 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan untuk bahan baku obat-obatan (Widaryanto & Azizah, 2018).

Mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020, jumlah komoditas binaan Direktorat Jenderal Hortikultura ada 569 jenis, terdiri dari; buah-buahan 60 jenis, sayuran 82 jenis, tanaman obat (biofarmaka) 66 jenis, dan tanaman hias 361 jenis. Akan tetapi, tanaman biofarmaka yang didata dalam statistik hortikultura tahun 2023 hanyalah 17 jenis, termasuk salah satunya adalah komoditas kapulaga.

Tanaman obat atau biofarmaka merupakan tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar (BPS, 2023).

Saat ini, permintaan akan tanaman biofarmaka cenderung meningkat baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Peningkatan permintaan ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat yang mengutamakan penggunaan obat tradisional atau *back to nature* (Suharno & Heriyanto, 2018). Kenaikan permintaan ini juga terjadi karena mahalannya obat-obatan modern, sehingga ketersediaan bahan baku yang bermutu dan berkelanjutan sangat diperlukan (Widaryanto & Azizah, 2018).

2.1.2 Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan adalah komoditas yang cocok dengan kondisi agroekologi setempat dan memiliki kemampuan bersaing baik di pasar lokal, regional, nasional, maupun internasional (Setiyanto, 2013). Komoditas unggulan adalah hasil produksi masyarakat yang memiliki peluang pasar yang tinggi dan menguntungkan (Hartopo, 2020).

Keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki berdasarkan potensi yang ada dan membedakannya dengan daerah yang lain, dapat berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Keunggulan komparatif ini digunakan untuk bersaing dengan daerah lain (Hartopo, 2020).

Pengaturan sistem pertanian dan penentuan komoditas unggulan sangat diperlukan bagi setiap wilayah pengembangan agar terciptanya sektor pertanian yang kuat, produktif, efisien, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan (Syafuruddin dkk., 2004).

2.1.3 Komoditas Kapulaga

Kapulaga atau kapol (*Amomum compactum* Solan ex Maton); sinonim: *A. Kepulaga spragus*, *A. Cariamomum* Auct. Non L. merupakan tanaman terna atau herba tahunan dari suku temu-temuan atau jahe-jahean (*Zingibraeae* atau *Scitamineae*). Tanaman ini terdapat tumbuh di Indonesia dan di Semenanjung Malaya. Buah kering yang dihasilkan dari tanaman terna aromatis ini dikenal dengan nama dagang kapulaga jawa atau siam (*Java cardamom*), kapulaga bulat (*round cardamom*), kapulaga gerombol (*cluster cardamom*). Dalam perdagangan, istilah *false cardamom* digunakan untuk membedakan kapulaga dengan kapulaga sabrang yang disebut *true cardamom* (kapulaga asli, kapulaga kecil) dari marga yang berbeda yakni *Elettaria*. Nama jenis kapulaga sabrang adalah *Elettaria cardamomum* Maton (Widaryanto & Azizah, 2018).

a. Klasifikasi

Kerajaan : *Plantae*
 Divisi : *Magnoliophyta*
 Kelas : *Liliopsida*
 Ordo : *Zingiberaceae*
 Genus : *Amomum*
 Spesies : *A. compactum Soland.* / *A. cardamomum*

b. Persyaratan Tempat Tumbuh

Tanaman kapulaga dapat tumbuh dan menghasilkan buah di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi, terutama pada ketinggian tempat 200-1.000 m dpl. Daerah dengan ketinggian tempat 300-500 m dpl banyak diusahakan untuk budidaya ini, karena diduga sebagai daerah budidaya yang paling ideal untuk tanaman ini (Widaryanto & Azizah, 2018).

Tanaman kapulaga dapat ditanam pada tanah yang memiliki topografi rata hingga lereng. Ketika ditanam di lahan berlereng curam, tanaman ini akan membentuk rumpun yang berguna untuk mengurangi atau membentuk aliran permukaan yang berlebihan, sehingga dapat menekan erosi permukaan. Selain itu, karena tanaman ini memiliki sifat tumbuh tahunan serta dapat dibudidayakan tanpa perlu membongkar tanaman yang sudah ada, maka tanaman ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif tanaman budidaya yang dapat dikembangkan di daerah aliran sungai berlahan curam. Penanaman tanaman ini di daerah aliran sungai hulu dapat membantu untuk menciptakan vegetasi permanen (Widaryanto & Azizah, 2018).

Tanaman kapulaga adalah jenis tanaman yang relatif mudah dalam budidayanya, karena tidak membutuhkan persyaratan jenis tanah yang khusus. Hampir semua daerah di Indonesia dapat ditanami dengan tanaman kapulaga (Hani & Octavia, 2021). Ada beberapa jenis tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kapulaga, diantaranya yaitu: latosol, andosol, alluvial, podsolik merah kuning, dan mediteran. Tanah dengan struktur lempung, lempung berliat, lempung berpasir, lempung berdebu, liat berpasir, dan liat juga masih bisa memberikan pertumbuhan yang baik hingga cukup baik bagi tanaman ini, asalkan memiliki kandungan bahan organik yang cukup tinggi. Derajat keasaman (pH) tanah yang ideal untuk pertumbuhan tanaman ini berkisar antara 5 sampai 6 (Widaryanto & Azizah, 2018). Tanaman kapulaga menyukai tanah dengan kandungan organik tinggi, sehingga apabila kandungan organik tanah rendah maka perlu dilakukan penambahan bahan organik berupa pemberian pupuk organik (Hani & Octavia, 2021).

Tanaman ini dipandang cocok ditanam di daerah dengan tipe curah hujan A, B, dan C menurut sistem Schmidt dan Ferguson. Namun, untuk daerah dengan tipe A, sebaiknya curah hujannya tidak terlalu tinggi. Curah hujan yang cocok untuk tanaman ini adalah antara 2.500-4.000 mm/tahun, karena tanaman membutuhkan kelembapan yang cukup tinggi. Namun, jika curah hujan terlalu tinggi, karangan bunga dapat menjadi pendek dan banyak yang busuk sehingga produksi buah berkurang. Di sisi lain, musim kemarau yang panjang dapat mengurangi pembentukan percabangan anakan baru sehingga jumlah bunga

yang dihasilkan juga kurang. Di daerah yang curah hujannya rata-rata 2.500 mm/tahun, diperlukan sekitar 136 hari hujan per tahun, bulan kering tidak lebih dari 3 bulan, bulan basah sedikitnya 8 bulan, dan bulan lembap (60-100 mm/bulan) sekitar 1,5 bulan. Suhu harian rata-rata daerah tempat tumbuh tanaman kapulaga yaitu berkisar antara 20-32 °C, sedangkan suhu di bawah tajuk pohon naungan yang cukup rimbun di daerah dataran rendah sedang (menengah) berkisar antara 23-30 °C (Widaryanto & Azizah, 2018).

Agar pertumbuhannya baik, tanaman kapulaga memerlukan naungan sepanjang siklus hidupnya, sehingga sangat cocok dikembangkan secara agroforestri (Hani & Octavia, 2021). Keberadaan pohon naungan sebagai salah satu faktor lingkungan biotik akan memberikan kondisi lingkungan yang cukup lembap dengan intensitas cahaya yang tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 30-70 persen, untuk pertumbuhan tanaman di daerah dataran rendah sampai menengah. Berdasarkan pengamatan intensitas cahaya di bawah tajuk tanaman kapulaga di daerah selatan Bogor, pada ketinggian 400-500 m dpl, intensitas cahayanya menunjukkan angka 3.500-8.000 Lux (Widaryanto & Azizah, 2018). Tanaman kapulaga yang ditanam di areal yang terlalu terbuka mempunyai risiko kematian pada saat musim kemarau karena kapulaga dapat mengalami kekeringan (Hariyono & Nizar, 2012).

Pertumbuhan tanaman kapulaga di daerah bertipe curah hujan B umumnya baik, tingginya mencapai 1,50-2,50 m dan bunganya banyak. Namun, jika tidak diberikan naungan yang cukup, pertumbuhannya akan terhambat serta daunnya akan rusak karena terbakar, mengering, dan sobek-sobek. Masalah ini umumnya terjadi pada pertanaman kapulaga di daerah dataran rendah sampai menengah, sementara di daerah yang lebih tinggi, sekitar 900 m dpl, gejala tersebut tidak begitu jelas terlihat. Keadaan ini dijumpai juga pada pertanaman kapulaga sabrang yang ditanam di daerah dengan ketinggian tempat 800 m dpl atau lebih, asalkan tekstur tanahnya cukup banyak mengandung fraksi liat atau bahan organik (Widaryanto & Azizah, 2018).

Pada saat akan melakukan budidaya tanaman kapulaga, petani disarankan untuk menanam pohon naungan setidaknya satu tahun sebelum penanaman tanaman kapulaga (Hani & Octavia, 2021). Banyak jenis pohon yang dapat

digunakan sebagai naungan untuk tanaman kapulaga. Beberapa di antaranya adalah: kelapa (*Cocos nucifera* L.), aren (*Arenga pinata* Merr.), duku (*Lansium domesticum* Correa), durian (*Durio zibethinus* L.), lamtoro atau petai cina (*Leucanea leucocephala.*), sengon atau jeungjing (*Albiz* sp.), kopi (*Coffea* sp.), pisang (*Musa paradisiaca* L.), nangka (*Artocarpus integer* Merr.), ki seriawan (*Symplocos odoratissima* Choisy), kedawung (*Parkiarox burghii* G,Don.), dan kenanga (*Canangium odoratum* Baill) (Widaryanto & Azizah, 2018).

c. Cara Perbanyak

Penyediaan bibit kapulaga umumnya diperbanyak secara generatif dengan menggunakan biji dan secara vegetatif dengan menggunakan rumpun atau tunas baru atau percabangan rizoma yang membentuk tunas. Secara umum, bibit yang baik adalah tunas yang tingginya lebih kurang 50 cm dengan akar rizoma yang muda dan mata tunasnya banyak, rizoma yang sudah tua pertumbuhannya kurang baik (Hariyono & Nizar, 2012).

Meskipun buah kapulaga memiliki banyak biji, namun perbanyak tanaman ini lebih mudah, murah, dan cepat tumbuhnya secara vegetatif atau dengan menggunakan sobekan rumpun tanaman atau yang disebut juga sebagai stek anakan (*stump*) (Widaryanto & Azizah, 2018). Stek anakan dipilih yang telah mempunyai helaian daun antara 2-10 buah. Apabila terdapat akar yang rusak karena proses pemecahan, sebaiknya dipotong karena akar tersebut tidak akan tumbuh. Adapun cara yang mudah untuk mengambil stek anakan dari rumpun adalah dengan menggali tanah sampai akar rimpang terlihat. Kemudian, gunakan pisau untuk memotong rimpang dan mengambil stek anakan yang masih muda agar lebih cepat berakar. Karena semakin tua umur stek anakan yang digunakan sebagai bibit, maka pertumbuhan akarnya akan semakin lambat. Hal ini disebabkan oleh zat penghambat pertumbuhan akar yang semakin banyak terkandung pada stek yang lebih tua (Hariyono & Nizar, 2012).

Perbanyak secara generatif atau dengan biji membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tahap berumpun, serta memiliki risiko variasi genetik pada tanaman yang terbentuk. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseragaman hasil dan mutu yang dicapai (Widaryanto & Azizah, 2018). Namun, bila akan diperbanyak dengan biji, maka biji harus dipilih dari pohon yang memproduksi tinggi. Biji

disemaikan terlebih dahulu di media tanam pasir. Setelah 2-3 hari, helai dipindahkan ke *polybag* ukuran 0,5-1 kg yang telah diisi media tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Kemudian bibit diletakkan di tempat yang ternaungi. Setelah berumur 8-12 bulan dan tinggi bibit telah mencapai 0,5-1 m maka bibit siap dipindahkan ke lapang (Hariyono & Nizar, 2012).

2.1.4 Teori Wilayah

Secara yuridis, dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Menurut Rustiadi, dkk. (2011), suatu wilayah pada umumnya tidak sekadar merujuk suatu tempat atau area, melainkan merupakan suatu kesatuan ekonomi, politik, sosial, administrasi, iklim hingga geografis, sesuai dengan tujuan pembangunan atau kajian. Kerangka klasifikasi konsep wilayah yang lebih mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah: (1) wilayah homogen (*uniform*), (2) wilayah sistem atau fungsional, dan (3) wilayah perencanaan atau pengelolaan (*planning region* atau *programming region*). Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah ini, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk dari konsep wilayah sistem. Sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan, terdapat konsep wilayah administratif politis dan wilayah perencanaan fungsional.

1. Wilayah Homogen

Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek homogenitas (kesamaan) dalam bentuk kelompok dan memaksimalkan perbedaan (kompleksitas, *varians*, ragam) antarkelompok tanpa memperhatikan bentuk hubungan fungsional (interaksi) antarwilayah-wilayahnya atau antarkomponen-komponen di dalamnya. Sumber-sumber kesamaan yang dimaksud dapat berupa kesamaan struktur produksi, konsumsi, pekerjaan, topografi, iklim, perilaku sosial, pandangan politik, tingkat pendapatan, dan lain-lain (Rustiadi, dkk., 2011)

2. Wilayah Nodal

Konsep wilayah nodal adalah salah satu konsep wilayah sistem atau fungsional yang sederhana karena memandang suatu wilayah secara dikotomis (terbagi atas dua bagian). Konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai plasma dan inti. Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan atau pemukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang (*periphery* atau *hinterland*), yang mempunyai sifat-sifat tertentu, dan mempunyai hubungan fungsional (Rustiadi, dkk., 2011).

Hierarki wilayah ditentukan oleh tingkat kapasitas pelayanannya. Kapasitas pelayanan suatu wilayah dicerminkan pula oleh *magnitude* (besaran) aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang ada di suatu wilayah. Wilayah yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas umum, industri, dan jumlah penduduk dengan kualitas dan kuantitas relatif paling lengkap dibandingkan dengan wilayah lain akan menjadi pusat atau mempunyai hierarki wilayah yang lebih tinggi. Sebaliknya jika suatu wilayah mempunyai jumlah dan fasilitas umum, industri, serta jumlah penduduk dengan kualitas dan kuantitas paling rendah merupakan wilayah *hinterland* dari unit wilayah lain secara administratif (Marcelina & Nasruddin, 2021).

Pusat wilayah berfungsi sebagai: (1) tempat terkonsentrasinya penduduk (pemukiman); (2) pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland*; (3) pasar bagi komoditas-komoditas pertanian maupun industri; dan (4) lokasi pemusatan industri manufaktur (*manufactory*) yakni kegiatan megorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu *output* tertentu. Sedangkan *hinterland* berfungsi sebagai: (1) pemasok (produsen) bahan-bahan mentah dan atau bahan baku; (2) pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi dan *comuting* (menglaju); (3) daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur; dan (4) penjaga keseimbangan ekologis (Rustiadi, dkk., 2011).

3. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir dapat dimasukkan dalam konsep wilayah sistem kompleks, memiliki beberapa sub sistem penyusun yang meliputi sistem ekologi (ekosistem), sistem sosial, dan sistem ekonomi (Rustiadi, dkk., 2011). Wilayah

pesisir didefinisikan sebagai wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut; ekosistem wilayah pesisir memiliki peranan yang sangat penting dan nilai yang paling tinggi di antara ekosistem di bumi ini dalam memberikan pelayanan terhadap keseimbangan lingkungan (Suryanti, dkk., 2019).

Secara formal di dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Secara diagnostik, wilayah pesisir dapat ditandai dengan empat ciri, yaitu:

- (1) Merupakan wilayah pencampuran atau pertemuan antara laut, darat dan udara. Bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari suatu proses penghancuran dan pembangunan ketiga unsur alam tersebut.
- (2) Wilayah pesisir dapat berfungsi sebagai zona penyangga dan merupakan habitat bagi berbagai jenis biota, tempat pemijahan, pembesaran, mencari makan, dan tempat berlindung bagi berbagai jenis biota laut dan pantai.
- (3) Wilayah pesisir memiliki perubahan sifat ekologi yang tinggi, dan pada skala yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berbeda.
- (4) Pada umumnya wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan menjadi sumber zat organik yang penting dalam suatu siklus rantai makanan di laut (Rustiadi, dkk., 2011).

4. Wilayah Perencanaan atau Pengelolaan Khusus

Wilayah perencanaan atau pengelolaan tidak selalu berwujud wilayah administratif tapi berupa wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah baik sifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan atau pengelolaan. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah yang terbentuk dengan matriks dasar kesatuan siklus hidrologis (sirkulasi air), sehingga DAS sebagai suatu wilayah berdasarkan konsep ekosistem perlu dikelola dan direncanakan secara seksama. Kawasan otoritas DAS sering dibentuk sebagai suatu wilayah perencanaan yang dibentuk berdasarkan asumsi konsep wilayah sistem ekologi (Rustiadi, dkk., 2011).

Selain itu, perwilayahan komoditas adalah contoh penetapan wilayah perencanaan atau pengelolaan yang berbasis pada unit-unit wilayah homogen. Suatu perwilayahan komoditas pertanian harus didasarkan pada kehomogenan faktor alamiah dan non alamiah. Konsep perwilayahan komoditas diawali oleh kegiatan evaluasi kesesuaian lahan (*land stability*) atau kemampuan lahan (*land capability*). Pemilihan komoditas yang akan diproduksi selanjutnya didasarkan atas sifat-sifat non alamiah, seperti jumlah penduduk, pengetahuan, keterampilan (*skill*), kelembagaan petani, pasar, dan lain-lain. Adanya sistem perwilayahan komoditas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi komoditas, karena perwilayahan komoditas pada dasarnya adalah suatu upaya memaksimalkan “*comparative advantage*” setiap wilayah. Beberapa alasan program perwilayahan komoditas menjadi wilayah homogen diantaranya: (1) budidaya bermacam-macam komoditas dalam satuan wilayah yang kecil tidak efisien, (2) upaya untuk menurunkan biaya pendistribusian *input* dan pendistribusian *output*, dan (3) untuk memudahkan manajemen. Walaupun demikian, perwilayahan komoditas juga akan dihadapkan pada satu kelemahan, yaitu kerentanan kawasan terhadap bahaya serangan hama (Rustiadi, dkk., 2011).

5. Wilayah Administratif Politis

Wilayah administratif adalah wilayah perencanaan atau pengelolaan yang memiliki landasan yuridis politis yang paling kuat. Konsep ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu. Wilayah yang dipilih tergantung dari jenis analisis dan tujuan perencanaannya. Sering pula wilayah administratif ini disebut wilayah otonomi. Artinya, suatu wilayah yang mempunyai suatu otoritas melakukan keputusan dan kebijaksanaan sendiri dalam pengelolaan sumber daya di dalamnya. Wilayah administratif merupakan wilayah yang dibatasi atas dasar kenyataan bahwa wilayah tersebut berada dalam batas-batas pengelolaan administrasi atau tatanan politis tertentu. Sebagai contoh: negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan (desa) (Rustiadi, dkk., 2011).

2.1.5 Teori Basis Ekonomi

Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Nilai strategis setiap sektor dalam memacu menjadi pendorong utama (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda-beda. Sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan menyebabkan terjadinya ekspor dan impor antar wilayah. Artinya, industri basis ini akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar wilayah atau daerah. Sedangkan sektor non basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang (Rustiadi, dkk., 2011). Aktivitas basis berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah, semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain, maka akan semakin cepat laju pertumbuhan wilayah tersebut, begitupun sebaliknya (Sapriadi & Hasbiullah, 2015).

Metode *location quotient* (LQ) merupakan metode yang sering digunakan sebagai indikasi sektor basis yang selanjutnya digunakan sebagai indikasi sektor unggulan (Rustiadi, dkk., 2011). Metode LQ merupakan perbandingan relatif antara kemampuan sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas. Berbagai dasar ukuran dalam pemakaian LQ harus disesuaikan dengan kepentingan penelitian dan sumber data yang tersedia. LQ juga menunjukkan efisiensi relatif wilayah, serta terfokus pada substitusi impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi ekspor. Hal ini akan memberikan suatu gambaran mengenai industri mana yang terkonsentrasi dan industri mana yang tersebar (Rustiadi, dkk., 2011).

Menurut Saragih (2015), metode LQ merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa suatu wilayah untuk suatu aktivitas tertentu dengan pangsa suatu wilayah untuk suatu basis atau fenomena agregat. LQ dapat digunakan untuk mengetahui konsentrasi dan/atau penyebaran aktivitas suatu produksi di suatu wilayah serta menggambarkan keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu komoditas di suatu wilayah. Sementara itu, menurut Warpani

(1984) metode LQ merupakan langkah awal untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Cara ini tidak atau belum memberikan kesimpulan akhir. Di mana kesimpulan yang diperoleh baru merupakan kesimpulan sementara yang masih harus dikaji dan ditilik kembali melalui teknik analisis lain yang dapat menjawab apakah kesimpulan sementara tersebut terbukti kebenarannya. Walaupun teknik ini tidak memberikan kesimpulan akhir, namun dalam tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam sektor yang diamati. Pada dasarnya teknik ini memberikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan, begitu juga dengan metode LQ. Kelebihan metode LQ dalam menganalisis komoditas unggulan yaitu penerapannya yang sederhana, mudah, tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Keterbatasan metode LQ adalah karena sederhananya pendekatan ini, maka yang dituntut adalah akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan LQ tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak valid. Oleh karena itu sebelum memutuskan menggunakan analisis ini maka validitas data sangat diperlukan. Disamping itu, untuk menghindari bias musiman dan tahunan diperlukan nilai rata-rata dari data *series* yang cukup panjang, sebaiknya tidak kurang dari 5 tahun. Keterbatasan lainnya adalah dalam deliniasi wilayah kajian. Untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas, metode ini tidak memiliki acuan yang jelas. Akibatnya hasil hitungan LQ terkadang aneh, tidak sama dengan apa yang kita duga. Oleh karena itu, data yang dijadikan sumber penelitian perlu diklarifikasi terlebih dahulu dengan beberapa sumber data lainnya, sehingga mendapatkan gambaran tingkat konsistensi data yang mantap dan akurat (Hendrayana, 2013).

Alat analisis LQ merupakan alat analisis sederhana untuk mengetahui apakah suatu daerah (atau sub daerah) sudah seimbang atau belum dalam kegiatan tertentu, yang dapat dilihat dari besarnya angka LQ. Jika proporsi tenaga kerja dalam setiap kategori lebih besar daripada koefisien LQ, maka kelebihanannya dianggap sebagai sektor ekspor. Dengan kata lain angka LQ memberikan indikasi sebagai berikut: (1) $LQ > 1$, menyatakan sub daerah bersangkutan mempunyai

potensi ekspor dalam kegiatan tertentu. (2) $LQ < 1$, menunjukkan sub daerah bersangkutan mempunyai kecenderungan impor dari sub daerah lain. (3) $LQ = 1$, memperlihatkan daerah yang bersangkutan telah mencukupi dalam kegiatan tertentu (seimbang) (Warpani, 1984).

2.1.6 Analisis Lokalisasi dan Spesialisasi

Menurut Warpani (1988), untuk memperkuat identifikasi terhadap suatu wilayah sebagai basis suatu komoditas menggunakan analisis lokalisasi dan spesialisasi. Analisis ini digunakan untuk melihat karakteristik wilayah terhadap dominasi kegiatan pertanian tertentu.

1. Analisis Lokalisasi

Analisis koefisien lokalisasi (α), yaitu analisis yang memberikan gambaran apakah suatu sektor ekonomi atau aktivitas ekonomi terlokalisasi pada suatu wilayah tertentu atau menyebar ke beberapa wilayah (Mamondol, 2014). Menurut Baruwadi & Akib (2017), analisis lokalisasi digunakan untuk mengukur lokalisasi relatif suatu komoditas di suatu wilayah, sedangkan menurut Handayani dkk. (2019), analisis koefisien lokalisasi digunakan untuk melihat tingkat penyebaran komoditi tertentu di suatu wilayah, yang dapat diketahui dengan melihat besarnya nilai koefisien lokalisasi. Koefisien lokalisasi diperoleh dengan menjumlahkan angka yang bertanda positif (Baruwadi & Akib, 2017). Dengan ketentuannya yaitu apabila nilai $\alpha \geq 1$, berarti jenis aktivitas yang dianalisis terlokalisasi dalam pembangunan perekonomian wilayah setempat, dan jika nilai $\alpha < 1$, berarti jenis aktivitas ekonomi tidak terlokalisasi dalam pembangunan wilayah setempat (Mamondol, 2014). Semakin kecil nilai koefisien maka semakin menyebar komoditas tersebut (Baruwadi & Akib, 2017).

2. Analisis Spesialisasi

Analisis koefisien spesialisasi (β), yaitu analisis yang menunjukkan apakah suatu wilayah mengkhususkan diri terhadap suatu jenis komoditi tertentu atau tidak ada pengkhususan (spesialisasi) (Mamondol, 2014). Analisis spesialisasi digunakan untuk melihat spesialisasi suatu wilayah terhadap suatu komoditas. Koefisien spesialisasi diperoleh dengan menjumlahkan angka yang bertanda

positif (Baruwadi & Akib, 2017). Dengan ketentuannya yaitu apabila nilai $\beta \geq 1$, berarti suatu sektor usaha mengkhususkan diri atau memiliki spesialisasi dalam pembangunan perekonomian di wilayah tersebut, dan apabila nilai $\beta < 1$, berarti tidak terjadi spesialisasi secara sektoral dalam pembangunan perekonomian wilayah yang dianalisis (Mamondol, 2014). Suatu kegiatan memiliki koefisien spesialisasi lebih besar dibandingkan dengan kegiatan lainnya di suatu wilayah berarti wilayah tersebut memiliki daya saing yang komparatif terhadap wilayah sekitarnya (Djakapermana, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Virida Zikria (2022), “Analisis Wilayah dan Kontribusi Kakao Terhadap Pembangunan Daerah di Kabupaten Parigi Moutong”	Daerah basis komoditas kakao di Kabupaten Parigi Moutong ada 11 kecamatan sehingga usaha tani komoditas kakao tidak terkonsentrasi atau tidak terpusat hanya pada satu wilayah namun tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Usaha tani komoditas kakao di wilayah basis tidak menspesialisasikan pada usaha tani kakao. Komoditas kakao berperan dalam pembangunan wilayah dan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong. Disarankan dengan perannya dalam pembangunan wilayah, pemerintah setempat bisa menggiatkan atau menstimulus petani kakao di kabupaten tersebut agar lebih meningkatkan hasil produksi serta menjaga kualitas dari komoditas tersebut.	- Alat analisis LQ, lokalisasi, dan spesialisasi - Indikator yang digunakan produksi	- Komoditas yang diteliti - Tempat penelitian - Cakupan wilayah penelitian - Alat analisis ditambah BSR dan RM - Jangka waktu 5 tahun
2.	Juri Juswandi dan Pandu Sumarna (2021), “Analisis <i>Trend</i> dan Perwilayahan Komoditas Mangga Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat”	Produksi mangga di Kabupaten Indramayu pada kurun waktu 2009-2019 menunjukkan <i>trend</i> produksi yang menurun pada sebagian besar kecamatan, hanya terdapat enam kecamatan yang menunjukkan <i>trend</i> produksi meningkat, yaitu Kecamatan Bangodua, Cantigi, Kandanghaur, Bongas, Anjatan, dan Sukra. Terdapat 10 kecamatan yang menunjukkan <i>trend</i> luas panen yang meningkat, yaitu Kecamatan Cikedung, Lelea, Bangodua, Krangkeng, Juntinyat, Sindang, Cantigi, Bongas, Anjatan, dan Sukra. Terdapat 17 kecamatan basis komoditas mangga di kabupaten	- Alat analisis LQ, lokalisasi, dan spesialisasi - Indikator yang digunakan produksi - Jangka waktu 10 tahun	- Komoditas yang diteliti - Tempat penelitian - Cakupan wilayah penelitian - Alat analisis ditambah <i>trend linier</i>

No	Peneliti & Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>Indramayu, yaitu Kecamatan Haurgeulis, Gantar, Kroya, Gabuswetan, Cikedung, Tukdana, Sliyeg, Jatibarang, Balongan, Sindang, Pasekan, Lohbener, Arahan, Losarang, Kandanghaur, Sukra, dan Patrol. Budidaya tanaman mangga di Kabupaten Indramayu tidak terkonsentrasi pada satu atau beberapa kecamatan, tetapi menyebar pada semua kecamatan. Tidak terdapat kecamatan yang mengkhususkan pada produksi tanaman mangga, tetapi terdapat keragaman budi daya berbagai buah-buahan pada semua kecamatan di Kabupaten Indramayu.</p> <p>Kecamatan Sukra merupakan kecamatan basis produksi mangga dengan <i>trend</i> produksi dan luas panen yang meningkat. Kecamatan Kandanghaur merupakan wilayah basis komoditas mangga dengan <i>trend</i> produksi yang meningkat. Tetapi <i>trend</i> luas panennya menurun. Kecamatan Cikedung dan Sindang merupakan kecamatan basis dengan <i>trend</i> luas panen yang meningkat, tetapi <i>trend</i> luas produksinya menurun. Kecamatan Haurgeulis, Gantar, Kroya, Gabuswetan, Tukdana, Sliyeg, Jatibarang, Balongan, Pasekan, Lohbener, Arahan, Losarang, dan Patrol merupakan kecamatan basis produksi mangga dengan <i>trend</i> produksi dan <i>trend</i> luas panen menurun.</p>		
3.	<p>Ari Septianingtyas Purwandhini, Astri Maesyaroh Ningtyas, dan Hikmatul Lutfi'ah (2019), "Analisis Perwilayahan Luas Areal Komoditas Tembakau di Kabupaten Jember Setelah Adanya Larangan Merokok"</p>	<p>1. Wilayah basis Kabupaten Jember setelah adanya larangan merokok dan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 Tahun 2012 sebanyak dua belas kecamatan, sedangkan wilayah non basis sebanyak tujuh kecamatan.</p> <p>2. Analisis lokalisasi menunjukkan bahwa luas areal komoditas tembakau di Kabupaten Jember tidak mengarah pada azas lokalisasi. Atau dapat dikatakan karakteristik penyebaran luas areal komoditas tembakau di Kabupaten Jember tidak terpusat pada satu wilayah kecamatan saja. Tetapi menyebar di beberapa kecamatan penghasil tembakau.</p> <p>3. Analisis spesialisasi menunjukkan bahwa wilayah di Kabupaten</p>	<p>- Alat analisis LQ, lokalisasi, dan spesialisasi</p>	<p>- Komoditas yang diteliti</p> <p>- Tempat penelitian</p> <p>- Cakupan wilayah penelitian</p> <p>- Indikator yang digunakan luas areal</p> <p>- Jangka waktu 12 tahun</p>

No	Peneliti & Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Jember tidak menspesialisasikan budidaya pada satu komoditas yaitu tembakau saja. Tetapi juga membudidayakan komoditas lainnya, seperti tebu, padi, kopi, kakao, dan komoditas unggulan lainnya.		
4.	Fransisca Wenny Astriyani Widya Sari dan Rita Herawaty Br Bangun (2020), "Identifikasi Potensi Wilayah Komoditas Jahe di Provinsi Sumatera Utara"	Wilayah basis komoditas jahe di Provinsi Sumatera Utara meliputi Tapanuli Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Samosir. Usahatani komoditas jahe di Provinsi Sumatera Utara tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja, melainkan menyebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Usahatani komoditas jahe di kabupaten basis Provinsi Sumatera Utara tidak menspesialisasikan pada usahatani komoditas jahe. Usahatani komoditas jahe di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan analisis <i>Basic Service Ratio</i> (BSR) dan <i>Regional Multiplier</i> (RM) menunjukkan bahwa komoditas jahe dapat berperan serta dalam mendukung kegiatan pertanian biofarmaka di Provinsi Sumatera Utara.	- Alat analisis LQ, lokalisasi, dan spesialisasi - Indikator yang digunakan produksi	- Komoditas yang diteliti - Tempat penelitian - Alat analisis ditambah BSR dan RM - Jangka waktu 3 tahun
5.	Ati Kusmiati dan Reni Windiarti (2011), "Analisis Wilayah Komoditas Kopi di Indonesia"	1. Daerah basis komoditas kopi di Indonesia terletak pada: a. Daerah basis produksi kopi di Indonesia antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. b. Daerah basis luas lahan komoditas kopi di Indonesia antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. 2. Analisis lokalisasi dan spesialisasi menunjukkan angka < 1 artinya usaha perkebunan komoditas kopi di Indonesia tidak terkonsentrasi dan tidak terspesialisasi pada satu wilayah. 3. Komoditas kopi mampu mendukung kegiatan perkebunan di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari nilai BSR dan RM yang lebih	- Alat analisis LQ, lokalisasi dan spesialisasi - Indikator yang digunakan produksi	- Komoditas yang diteliti - Tempat penelitian - Cakupan wilayah penelitian - Indikator yang digunakan di tambah luas lahan - Alat analisis ditambah BSR dan RM

No	Peneliti & Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		dari satu. Komoditas kopi mampu memberikan kontribusi berupa nilai tambah terhadap wilayah basis. Sedangkan berdasarkan nilai RM yang secara keseluruhan lebih besar dari satu (>1), hal ini menunjukkan bahwa komoditas kopi mampu mendukung kegiatan perkebunan secara nasional.		

2.3 Pendekatan Masalah

Komoditas kapulaga termasuk ke dalam salah satu tanaman biofarmaka. Kapulaga merupakan rempah yang populer dalam pengobatan tradisional karena mengandung antioksidan yang berguna untuk menjaga kesehatan dan tidak menimbulkan efek toksik (Herliadi dkk., 2017). Kapulaga dapat tumbuh dan menghasilkan buah di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi, serta dapat ditanam pada tanah yang memiliki topografi rata hingga lereng. Selain itu, kapulaga menghendaki kondisi lingkungan yang cukup lembap dengan intensitas cahaya yang tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, agar pertumbuhannya baik, maka kapulaga memerlukan naungan dari tanaman lain (Widaryanto & Azizah, 2018).

Kapulaga termasuk golongan rempah yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Saat ini, kapulaga sebagai rempah asli Indonesia makin diminati oleh pasar ekspor (Hani & Octavia, 2021). Bahkan Indonesia menempati urutan keempat sebagai pengeksportir kapulaga terbesar ke pasar dunia (Pribadi, 2022). Maka dari itu, pemerintah terus mendorong perkembangan produksi kapulaga menjadi salah satu komoditas unggulan dan berdaya saing karena potensinya yang besar tersebut. Sebagaimana disampaikan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam berita utama Kementerian Pertanian (2021) bahwa pemerintah terus mendorong perkembangan produksi hortikultura unggul dan berdaya saing, salah satunya yaitu komoditas kapulaga. Pemerintah menyatakan bahwa komoditas kapulaga memiliki prospek yang sangat baik, dan mengharapkan agar komoditas kapulaga dapat lebih banyak diminati oleh masyarakat. Tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat sebagai sentra utama komoditas kapulaga di Indonesia.

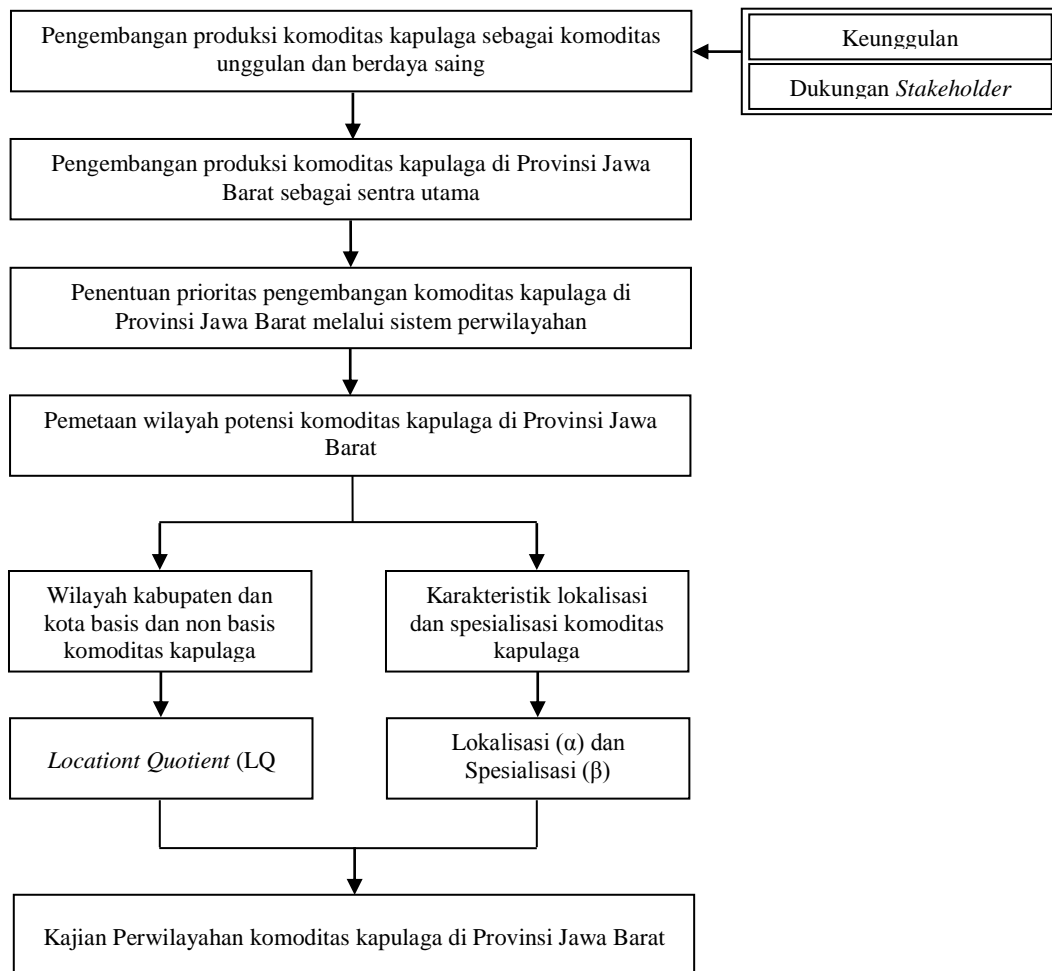
Guna tercapainya pengembangan produksi kapulaga sebagai salah satu komoditas unggul dan berdaya saing, terutama di Provinsi Jawa Barat, maka

diperlukan adanya penentuan prioritas pengembangan komoditas kapulaga melalui sistem perwilayahan. Dengan adanya sistem perwilayahan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi komoditas. Karena pada dasarnya, perwilayahan komoditas adalah suatu upaya memaksimalkan “*comparative advantage*” setiap wilayah (Rustiadi dkk., 2011).

Sistem perwilayahan komoditas kapulaga di Provinsi Jawa Barat ini dapat dilakukan dengan pemetaan wilayah yang memiliki potensi pengembangan komoditas kapulaga di Provinsi Jawa Barat. Pemetaan tersebut mencakup dua aspek utama, yakni pemetaan wilayah yang menjadi basis dan non basis komoditas kapulaga di Provinsi Jawa Barat, serta peninjauan karakteristik lokalisasi dan spesialisasi komoditas kapulaga di Provinsi Jawa Barat.

Guna mengetahui wilayah-wilayah kabupaten dan kota yang potensial untuk pengembangan komoditas kapulaga di Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini adalah wilayah basis, dipergunakan analisis *Location Quotien* (LQ). Menurut Warpani (1984), LQ merupakan langkah awal untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Di mana teknik ini memberikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Langkah selanjutnya untuk memperkuat identifikasi terhadap suatu wilayah sebagai basis komoditas kapulaga di Provinsi Jawa Barat adalah dengan melihat karakteristik lokalisasi dan spesialisasinya melalui analisis lokalisasi dan analisis spesialisasi. Analisis tersebut dipergunakan untuk mengetahui apakah komoditas kapulaga di Provinsi Jawa Barat telah terlokalisasi pada wilayah kabupaten dan kota tertentu atau belum, serta apakah wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat telah menspesialisasikan pada satu jenis komoditas yaitu komoditas kapulaga atau belum. Menurut Baruwadi & Akib (2017), pendekatan lokalisasi digunakan untuk mengukur lokalisasi relatif suatu komoditas di suatu wilayah, sedangkan pendekatan spesialisasi digunakan untuk melihat spesialisasi suatu wilayah terhadap suatu komoditas.

Berikut merupakan bagan pendekatan masalah dalam penelitian ini:



Gambar 1. Bagan Pendekatan Masalah